

**PENGARUH TINGKAT PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN
ASLI DAERAH, UKURAN PEMERINTAH DAERAH, BELANJA
MODAL, DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP
KELEMAHAN PENGENDALIAN INTERN
PADA PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris Pada Kabupaten Dan Kota Provinsi Riau
Dan Sumatera Barat)**

Oleh :

Muhammad Iqbal

Pembimbing : Amries Rusli Tanjung dan Supriono

Faculty Of Economic Riau University, Pekanbaru, Indonesia

Email : muhammadiqbalzb@gmail.com

*The Influence Of Economic Growth Rate, Locally-Generated Revenue,
Government Size, Capital Expenditure And Population To The
Weakness Of Internal Control System
(Empirical Study In The District And The City Of Riau Province And West
Sumatera Province)*

ABSTRACT

The research aims to analyze of economic growth rate, locally-generated revenue, government size, capital expenditure and population to the weakness of internal control. Object of this research are Riau and Sumatera Barat Province. That data are analyzed by linear regression method and SPSS program version 19. The variables were examined economic growth rate, locally-generated revenue, government size, capital expenditure and population to the weakness of internal control. The results of this research showed economic growth rate has an effect to the weakness of internal control with 0,048 significance, locally-generated revenue has an effect to the weakness of internal control with 0,012 significance, government size has an effect to the weakness of internal control with 0,009 significance, capital expenditure has no effect to the weakness of internal control with 0,607 significance and population has an effect to the weakness of internal control with 0,037 significance. The results of this research also showed that coefficient R square is 81,9%. Each independent variables, gives the strong influence to dependent variable, it means independent variables could explain dependent variable well. While the remaining influenced by other variables not included in the regression models were not included in this study. All variables also have strong relation with variable dependents in this research.

Keywords: economic, revenue, government size, capital expenditure and population

PENDAHULUAN

Banyaknya pemerintahan daerah di Indonesia dengan otonomi

yang semakin besar, membuat pengawasan yang baik sangat dibutuhkan agar tidak terjadi kecurangan (*fraud*). Kecurangan

dalam organisasi baik di sektor pemerintahan maupun di sektor swasta biasanya disebabkan oleh lemahnya pengendalian intern. Berdasarkan *KPMG Fraud Survey 2006* ditemukan bahwa lemahnya pengendalian intern menjadi faktor utama penyebab terjadinya kecurangan yaitu sebesar 33% dari total kasus kecurangan yang terjadi. Faktor kedua adalah diabaikannya sistem pengendalian intern yang telah ada sebesar 24%. Dari dua faktor tersebut terlihat bahwa keberadaan dan pelaksanaan pengendalian intern sangat penting.

Hal lain yang dapat menyebabkan terjadinya kelemahan intern yaitu adanya penerapan sistem desentralisasi pada sektor pemerintahan yang ditandai dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang sekarang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dikeluarkannya regulasi tersebut akan menjadi landasan bagi pemberian otonomi daerah yang lebih besar kepada daerah. Pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau yang lebih populer disebut dengan otonomi daerah menjadikan kebutuhan akan pengendalian dalam menjalankan otonomi daerah sangat penting. Pengendalian dalam sebuah organisasi mutlak diperlukan untuk menanggulangi terjadinya kecurangan (*fraud*).

Pada era sekarang pengendalian internal pengelolaan keuangan masih jauh dari harapan, dilihat dari hal penyajian laporan keuangan masih banyak daerah yang mendapat opini WDP (Wajar

Dengan Pengecualian), *disclaimer* dan tidak wajar. Jika dari hasil pemahaman dan pengujian efektivitas pengendalian internal ternyata pengendalian internal dalam pemerintah daerah klien sangat lemah atau sama sekali tidak ada, tidaklah mungkin bagi akuntan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan klien. Masalah utama yang timbul karena sangat lemahnya pengendalian internal adalah adanya kemungkinan tidak dicatatnya jumlah-jumlah yang material. Oleh karena itu, jika pengendalian internal sangat jelek, akuntan harus menolak untuk melaksanakan pemeriksaan atau menolak memberikan pendapat atas laporan keuangan yang diperiksanya.

Pengendalian internal dibuat untuk semua tindakan oleh sebuah organisasi untuk memberikan keamanan terhadap *assets* dari pemborosan, kecurangan dan ketidakefisienan penggunaan serta untuk meningkatkan ketelitian dan tingkat kepercayaan dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, undang-undang di bidang keuangan negara membawa implikasi tentang perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan untuk mencapai pengendalian internal yang memadai. Selain itu, pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya dapat dilihat dari seberapa besar daerah akan memperoleh dana perimbangan, tetapi hal tersebut harus diimbangi dengan sejauh mana instrumen atau sistem pengelolaan keuangan daerah mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif dan bertanggungjawab untuk mewujudkan *good governance*.

Aset merupakan sumber daya yang harus dipertanggungjawabkan penggunaannya kepada masyarakat, maka perlu dilakukan inventarisasi dan penilaian atas aset-aset milik Pemerintah Daerah, sehingga dapat diketahui secara pasti jenis dan jumlah aset yang menjadi sumber daya milik Pemerintah Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal. Fakta ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan menemukan bahwa ukuran berpengaruh negatif terhadap kelemahan pengendalian internal. Dikarenakan pemerintah daerah yang memiliki total aset yang tinggi memiliki kelemahan pengendalian yang rendah. Pemerintah daerah diharapkan bisa mempertahankan dan meningkatkan kualitas pengendalian internal untuk mengurangi terjadinya kelemahan pengendalian internal sedangkan Larassaty, et al. (2013) dan Kristanto (2009) menemukan bahwa ukuran berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian internal.

Faktor lain yang mempengaruhi lemahnya sistem pengendalian Intern yaitu belanja modal. Belanja Modal adalah pengeluaran negara yang digunakan dalam rangka pembentukan modal atau aset tetap untuk operasional sehari-hari dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Belanja modal meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan bentuk fisik lainnya (Kristanto, 2009). Belanja modal sangat erat kaitannya dengan pengadaan barang fisik atau aset tetap. Semakin banyak jumlah belanja modal yang dimiliki suatu daerah maka alokasi untuk

pengadaan aset tetap semakin tinggi. Proyek pengadaan barang ini yang sangat rawan terjadi kecurangan yang merugikan pemerintah.

Menurut Abdullah (2008) dalam Kristanto (2009) Belanja Modal berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal. Hal ini disebabkan karena semakin besar anggaran belanja modal yang tidak dimbangi dengan system pengendalian yang semakin baik maka akan banyak terjadi penyalahgunaan belanja modal sebagai objek korupsi oleh pihak legislatif dan eksekutif yang tidak bertanggungjawab. Semakin banyak jumlah belanja modal yang dimiliki suatu daerah maka alokasi untuk pengadaan aset semakin tinggi. Tanpa pengendalian intern pemerintah yang baik kecurangan dan penyalahgunaan belanja modal lebih mudah dilakukan karena kurangnya pengawasan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :1) Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Kelemahan Pengendalian Intern?2) Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kelemahan Pengendalian Intern?3) Apakah Ukuran Pemerintah berpengaruh terhadap Kelemahan Pengendalian Intern?4) Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap Kelemahan Pengendalian Intern?5) Apakah Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Kelemahan Pengendalian Intern?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) Pengaruh tingkat pertumbuhan ekonomi Pemerintah Daerah terhadap kelemahan pengendalian intern Pemerintah Daerah. 2) Pengaruh

PAD terhadap kelemahan pengendalian intern Pemerintah Daerah.3) Pengaruh Ukuran Pemerintah terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah.4) Pengaruh Belanja Modal terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah. 5) Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap kelemahan pengendalian intern Pemerintah Daerah.

TELAAH PUSTAKA

Kelemahan Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan atau seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Mahmudi (2011). Menurut *Public Company accounting Oversight Board* dalam menyatakan kelemahan pengendalian internal merupakan kelemahan signifikan yang hasilnya jauh dari kondisi salah saji material pada laporan keuangan tahunan yang tidak dapat dicegah atau dideteksi.

Para spesialis pencegahan kerugian melatih karyawan agar waspada dengan aktivitas yang mencurigakan. Karyawan yang menangani kas sangat rentan terhadap godaan. Banyak pemerintahan membeli *fidelity bonds* terhadap para kasir. *Fidelity bond* adalah polis asuransi yang akan memberi ganti rugi kepada pemerintahan atas setiap kerugian

akibat pencurian oleh karyawan. Sebelum menerbitkan *fidelity bond*, pemerintahan asuransi menyelidiki catatan karyawan. Cuti wajib (*Mandatory Vacations*) dan rotasi tugas (*job rotation*) akan memperbaiki pengendalian internal. Pemerintahan merotasi karyawannya dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya. Hal ini dapat meningkatkan moral dengan memberikan para karyawan pandangan yang lebih luas mengenai pemerintahan. Selain itu, dengan mengetahui bahwa orang lain akan menggantikan tugas anda bulan depan juga akan mempertahankan kejujuran anda.

Tidak ada sistem pengendalian internal dengan sendirinya dapat menjamin administrasi yang efisien, kelengkapan dan keakuratan pencatatan. Indra Bastian (2003).

1. Pengendalian intern yang bergantung pada pemisahan tugas dapat dihindari dengan kolusi.
2. Otorisasi dapat diabaikan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu atau oleh manajemen.
3. Personel keliru dalam memahami perintah karena kelalaian, tidak perhatian, maupun kelelahan.

Dalam IHPS BPK dijelaskan bahwa kelemahan tersebut mengakibatkan permasalahan dalam aktivitas pengendalian yang menimbulkan kasus-kasus kelemahan SPI sebagai berikut:

- a. Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan
 1. Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan.
 2. Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai.
 3. Entitas terlambat menyampaikan laporan.

4. Pencatatan tidak atau belum dilakukan atau tidak akurat.
 5. Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung sumber daya manusia yang memadai.
- b. Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan APBD Kelemahan Struktur Pengendalian Intern
1. Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan daerah dan hibah tidak sesuai dengan ketentuan.
 2. Penyimpangan terhadap peraturan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja.
 3. Perencanaan kegiatan tidak memadai.
 4. Pelaksanaan belanja diluar mekanisme APBN/APBD.

Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah mengukur prestasi dari perkembangan suatu daerah dari suatu periode ke periode berikutnya. Suatu daerah dikatakan mengalami pertumbuhan dari segi ekonomi apabila tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai sekarang lebih tinggi dari pada yang dicapai pada masa sebelumnya. Kegiatan ekonomi berasal dari berbagai sektor seperti kegiatan pertanian, pertambangan, industri pengolahan, sampai dengan jasa (Larassaty, at al. 2013).

Menurut Titus. (2013), pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tujuan penting yang ingin dicapai pemerintah daerah. Besar

kecilnya pertumbuhan ekonomi dapat mengindikasikan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengatur dan menjalankan kegiatan ekonominya dengan baik. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kelemahan pengendalian internal. Jika terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi pada pemerintah daerah akan mengurangi jumlah kasus terhadap kelemahan pengendalian internal.

Sedangkan menurut Sukirno (2011), pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fiskal produksi barang dan jasa yang berlaku disuatu negara, seperti penambahan dan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, penambahan jumlah sekolah, penambahan produksi sektor jasa dan pertambahan produksi barang modal. Tetapi dengan menggunakan berbagai jenis data produksi adalah sangat sukar untuk memberi gambaran tentang pertumbuhan ekonomi yang dicapai.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah PAD secara signifikan berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian internal. Pemerintah daerah yang memiliki PAD tinggi akan memiliki kelemahan pengendalian intern yang lebih banyak (Martani dan Zaelani, 2011).

Selain itu, Pendapatan Asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut

berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Christine, 2010). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan asli daerah yang potensinya berada di daerah dan dikelola oleh pemerintah yang bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini merupakan salah satu sumber pendapatan yang cukup diandalkan oleh pemerintah Kota/Kabupaten, karena dana ini murni digali sendiri dan dapat digunakan sepenuhnya untuk dimanfaatkan sesuai prioritas daerah dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Ukuran Pemerintah Daerah

Ukuran pemerintah daerah adalah sebuah skala yang dapat menunjukkan besar kecilnya keadaan Pemerintah Daerah (Hartono 2014). Ukuran dalam sebuah entitas lazimnya digunakan sebagai suatu skala ukur dimana dapat diklasifikasikan ukuran besar kecilnya suatu entitas.

Size (ukuran) Pemerintah Daerah dapat menunjukkan besar kecilnya keadaan Pemerintah Daerah. Aset atau aktiva adalah sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat usaha di kemudian hari. Semakin besar ukuran pemerintahan semakin mudah untuk mendapatkan modal eksternal dalam jumlah yang lebih besar, sehingga investor tertarik untuk menanamkan modalnya pada pemerintahan tersebut. Hal ini dikarenakan setiap pemerintah daerah memiliki ukuran yang berbeda (Larassati, 2013).

Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran negara yang digunakan dalam rangka pembentukan modal atau aset tetap untuk operasional sehari-hari dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Belanja modal meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan bentuk fisik lainnya (Kristanto, 2009).

Menurut Titus (2013) Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Besaran nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset Belanja Modal dipergunakan untuk antara lain: Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan bangunan, Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan, Belanja Modal lainnya, dan Belanja Modal Badan Layanan Umum (BLU).

Jumlah Penduduk

Penduduk atau warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara (Undang-undang nomor 12 tahun 2006).

Banyaknya jumlah penduduk di suatu daerah dapat mencerminkan pengalokasian anggaran dari Pemerintah Pusat untuk setiap daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing. Pemerintah Daerah yang memiliki

jumlah penduduk banyak dituntut untuk melakukan pengendalian intern yang baik sebagai pertanggungjawaban kepada publik.

Semakin besar ukuran pemerintahan semakin mudah untuk mendapatkan modal eksternal dalam jumlah yang lebih besar, sehingga investor tertarik untuk menanamkan modalnya pada pemerintahan tersebut. Hal ini dikarenakan setiap pemerintah daerah memiliki ukuran yang berbeda (Larassati, 2013).

Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kelemahan Pengendalian Intern

Pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah mengukur prestasi dari perkembangan suatu daerah dari suatu periode ke periode berikutnya. Suatu daerah dikatakan mengalami pertumbuhan dari segi ekonomi apabila tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai sekarang lebih tinggi dari pada yang dicapai pada masa sebelumnya. Kegiatan ekonomi berasal dari berbagai sektor seperti kegiatan pertanian, pertambangan, industri pengolahan, sampai dengan jasa (Larassaty, at al. 2013).

H1: Diduga pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kelemahan Pengendalian Intern

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan

asli daerah yang sah PAD secara signifikan berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian internal. Pemerintah daerah yang memiliki PAD tinggi akan memiliki kelemahan pengendalian intern yang lebih banyak (Martani dan Zaelani, 2011). Sedangkan Darwanto dan Yustikasari (2007) menemukan adanya perbedaan preferensi antara eksekutif dan legislatif dalam pengalokasian PAD ke dalam belanja sektoral di Indonesia. Adanya penurunan alokasi pendidikan dan kenaikan alokasi infrastruktur diduga disebabkan oleh adanya kekuasaan legislatif yang sangat besar sehingga menyebabkan kewenangan atas penggunaan jumlah PAD tidak sesuai dengan preferensi publik dan karena adanya kewenangan tersebut ditemukan adanya korupsi politik oleh legislatif.

H2: Diduga pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal

Pengaruh Ukuran Pemerintah terhadap Kelemahan Pengendalian Intern

Ukuran pemerintah daerah adalah sebuah skala yang dapat menunjukkan besar kecilnya keadaan Pemerintah Daerah (Hartono 2014). Aset atau aktiva dalam sebuah entitas lazimnya digunakan sebagai suatu skala ukur dimana dapat diklasifikasikan ukuran besar kecilnya suatu entitas. Aset atau aktiva adalah sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat usaha di kemudian hari. Aset atau aktiva dipahami sebagai harta total.

Sedangkan menurut Sukirno (2011), pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fiskal produksi

barang dan jasa yang berlaku disuatu negara, seperti pertambahan dan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, pertambahan jumlah sekolah, pertambahan produksi sektor jasa dan pertambahan produksi barang modal. Tetapi dengan menggunakan berbagai jenis data produksi adalah sangat sukar untuk memberi gambaran tentang pertumbuhan ekonomi yang dicapai.

Penelitian dari Kristanto (2009) menyatakan bahwa ukuran pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern menemukan adanya hubungan yang negatif antara ukuran perusahaan terhadap kelemahan pengendalian internal.

H3: Diduga ukuran pemerintah berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal

Pengaruh Belanja Modal terhadap Kelemahan Pengendalian Intern

Belanja modal adalah pengeluaran negara yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal atau aset tetap untuk operasional sehari-hari suatu satuan kerja, dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan yaitu mensejahterakan masyarakat. Belanja modal sangat erat kaitannya dengan pengadaan barang fisik atau aset tetap. Semakin banyak jumlah belanja modal yang dimiliki suatu daerah maka alokasi untuk pengadaan aset tetap semakin tinggi. Proyek pengadaan barang ini yang sangat rawan terjadi kecurangan yang merugikan pemerintah. Belanja modal meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung

dan bangunan, jalan, irigasi, dan bentuk fisik lainnya (Kristanto, 2009).

H4: Diduga belanja modal berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal

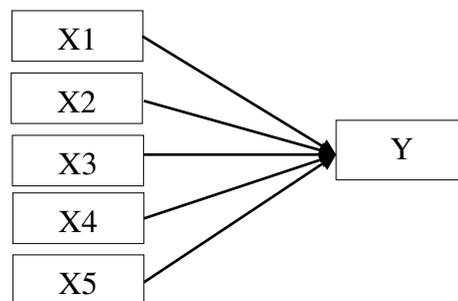
Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Kelemahan Pengendalian Intern

Jumlah penduduk adalah semua orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga Negara. Larassati, dkk (2013), menemukan bahwa jumlah penduduk berpengaruh signifikan positif terhadap kelemahan pengendalian internal. Hal ini dikarenakan Pemerintah Daerah yang memiliki mlajuh penduduk banyak dituntut untuk melakukan pengendalian intern yang baik sebagai pertanggungjawaban kepada publik. Sedangkan menurut Martani dan Zaelani (2011) jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern.

H5: Diduga jumlah penduduk berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal

Model Penelitian

Berikut ini adalah model penelitian dari pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen:



Sumber: *Data Olahan, 2016*

METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2008) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi di penelitian ini adalah 31 Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau dan Sumatera Barat.

Metode Analisis Data

Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang digunakan berdistribusi normal. Salah satu cara melihat normalitas yaitu dengan histogram, yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Kedua, dengan normal probability plot, yaitu distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data adalah normal, maka garis yang menggambarkan data akan mengikuti garis diagonalnya.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau

sempurna antar variabel independen. Uji Multikolinieritas dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan melihat VIF (*Variance Inflation Factors*) dan nilai *Tolerance*. Jika $VIF > 10$ dan nilai $Tolerance < 0,10$ maka terjadi gejala Multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat ditentukan dengan melihat grafik Plot (*Scatterplot*) antara nilai prediksi variabel terikat (*ZPRED*) dengan residual (*SRESID*). Jika grafik plot menunjukkan suatu pola titik yang bergelombang atau melebar kemudian menyempit, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Berganda

Model regresi linier berganda adalah model regresi yang memiliki lebih dari satu variabel independen. Model regresi linier berganda dilakukan model yang baik jika model tersebut memenuhi asumsi normalitas data. Persamaan regresi linier berganda yaitu :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) dan Pengujian Hipotesis

Untuk melakukan pengujian hipotesis secara parsial digunakan Uji t. Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel

independen dengan variabel dependen, dan untuk mengetahui apakah variabel bebas memiliki hubungan signifikan/tidak dengan variabel terikat secara individual untuk setiap variabel. Penelitian ini menggunakan instrumen penelitian dengan kuesioner dan penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam penelitian.

Definisi Operasionalisasi Variabel

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Doyle et. Al 2007).

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan (Pasal 6 ayat 1), yang bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi.

Ukuran pemerintah daerah dapat menggambarkan besar kecilnya skala pemerintah daerah tersebut. Ukuran pemerintah daerah dapat diukur dengan jumlah *assets* atau aktiva yang dimiliki daerah tersebut (Hartono, 2014).

Menurut Titus (2013) Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, kemudian aset tersebut digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Penduduk atau warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan

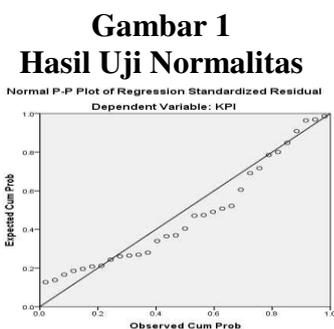
perundang-undangan. Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Normalitas

Pada grafik normal *P-P Plot* terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Kedua grafik ini menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena asumsi normalitas. Didalam penelitian ini disajikan dalam graifik P-Plot. Dimana dasar pengambilan keputusan yaitu:

1. Jika sumbu menyebar sekitar garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Gambar penelitian ini untuk menunjukkan normalitas data dari suatu penelitian.



Sumber :Data Olahan, 2016

Hasil Uji Multikolinieritas

Pada penelitian ini, nilai tolerance yang dihasilkan dalam

penelitian ini berada diantara 0.1-1.0, dan nilai VIF diantara 1.0-10. Dengan demikian dapat dijustifikasi bahwa keseluruhan variabel bebas yang digunakan dalam penelitian terbebas dari asumsi multikolinieritas.

Nilai dari *tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi. Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai *tolerance* <0,10 atau nilai VIF > 10.

Nilai yang disajikan dalam uji multikolinieritas digunakan untuk melihat apakah masing-masing variabel independen memiliki kesamaan dengan variabel independen lainnya dan menghindari adanya kesamaan atas kesalahan peengganggu yang terjadi untuk masing-masing variabel independen untuk terbebas dari multikolinieritas didalam penelitian. Uji multikolinieritas digunakan untuk varians data. Hasil uji multikolinieritas dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1
Hasil Uji Multikolinieritas

| Variabel | Tolerance | VIF |
|----------|-----------|-------|
| X1 | .507 | 1.974 |
| X2 | .530 | 1.887 |
| X3 | .328 | 3.046 |
| X4 | .498 | 2.006 |
| X5 | .804 | 1.244 |

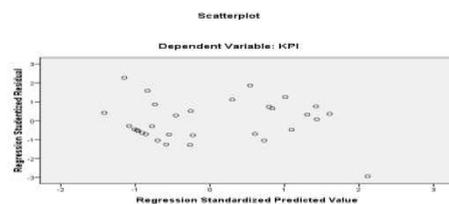
Sumber :Data Olahan, 2016

Hasil Uji Heterokedastisitas

Pada penelitian ini, terlihat bahwa titik-titik tidak membentuk

pola tertentu dan menyebar pada sumbu Y.

Gambar 2
Hasil Uji Heterokedastisitas



Sumber :Data Olahan, 2016

Analisis Regresi Linear Berganda

Persamaan regresi linear berganda dari model penelitian menjadi sebagai berikut dengan menggunakan analisis variabel dalam penelitian untuk mengukur pengaruh atau tidaknya:

$$Y = 3.011 + 0,361X_1 + 0,279X_2 + 2,822X_3 + 7,386X_4 + 2,879X_5$$

1. Variabel pertumbuhan ekonomi mempunyai $t_{hitung} (2,083) >$ dari $t_{tabel} (2,039)$ atau dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,048 < \alpha = 0,05$. Oleh karena itu H_1 diterima, artinya pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal. Dengan demikian, hasil penelitian ini berhasil menerima hipotesis pertama yang menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi (X_1) berpengaruh terhadap Kelemahan Pengendalian Intern (Y).
2. Variabel pendapatan asli daerah mempunyai $t_{hitung} (2,707) >$ dari $t_{tabel} (2,039)$ atau dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,012 < \alpha = 0,05$. Oleh karena itu H_2 diterima, artinya pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal.

Dengan demikian, hasil penelitian ini berhasil menerima hipotesis pertama yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (X2) berpengaruh terhadap Kelemahan Pengendalian Intern (Y).

3. Variabel ukuran pemerintahan mempunyai $t_{hitung} (2,835) >$ dari $t_{tabel} (2,039)$ atau dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,009 < \alpha = 0,05$. Oleh karena itu H_3 diterima, artinya ukuran pemerintahan berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal. Dengan demikian, hasil penelitian ini berhasil menerima hipotesis pertama yang menyatakan bahwa Ukuran Pemerintahan (X3) berpengaruh terhadap Kelemahan Pengendalian Intern (Y).
4. Variabel belanja modal mempunyai $t_{hitung} (0,521) <$ dari $t_{tabel} (2,039)$ atau dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,607 > \alpha = 0,05$. Oleh karena itu H_4 ditolak, artinya belanja modal tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan dan penurunan belanja modal tidak akan mempengaruhi terjadinya kasus kelemahan pengendalian intern. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kristanto (2009) yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah. Menurut Kristanto (2009), belanja modal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah

daerah kabupaten/kota dikarenakan tidak terdeteksi adanya tindak korupsi atau kolusi oleh pejabat daerah, DPRD, dan pengusaha yang menimbulkan lemahnya pengendalian intern.

5. Variabel jumlah penduduk mempunyai $t_{hitung} (2,204) >$ dari $t_{tabel} (2,039)$ atau dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,037 < \alpha = 0,05$. Oleh karena itu H_5 diterima, artinya jumlah penduduk berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal. Dengan demikian, hasil penelitian ini berhasil menerima hipotesis pertama yang menyatakan bahwa Jumlah Penduduk (X5) berpengaruh terhadap Kelemahan Pengendalian Intern (Y).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bagian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi(X1)berpengaruh terhadap Kelemahan Pengendalian Intern (Y). Variabel pertumbuhan ekonomi mempunyai $t_{hitung} (2,083) >$ dari $t_{tabel} (2,039)$ atau dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,048 < \alpha = 0,05$. Oleh karena itu H_1 diterima, artinya pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal. Dengan demikian, hasil penelitian ini berhasil menerima hipotesis pertama yang menyatakan bahwa Pertumbuhan

- Ekonomi (X1) berpengaruh terhadap Kelemahan Pengendalian Intern (Y).
- 2) Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan Pendapatan Asli Daerah (X2) berpengaruh terhadap Kelemahan Pengendalian Intern (Y). Variabel pendapatan asli daerah mempunyai $t_{hitung} (2,707) >$ dari $t_{tabel} (2,039)$ atau dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,012 < \alpha = 0,05$. Oleh karena itu H_2 diterima, artinya pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal. Dengan demikian, hasil penelitian ini berhasil menerima hipotesis pertama yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (X2) berpengaruh terhadap Kelemahan Pengendalian Intern (Y).
 - 3) Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa Ukuran Pemerintahan (X3) berpengaruh terhadap Kelemahan Pengendalian Intern (Y). Variabel ukuran pemerintahan mempunyai $t_{hitung} (2,835) >$ dari $t_{tabel} (2,039)$ atau dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,009 < \alpha = 0,05$. Oleh karena itu H_3 diterima, artinya ukuran pemerintahan berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal. Dengan demikian, hasil penelitian ini berhasil menerima hipotesis pertama yang menyatakan bahwa Ukuran Pemerintahan (X3) berpengaruh terhadap Kelemahan Pengendalian Intern (Y).
 - 4) Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa Belanja Modal (X4) tidak berpengaruh terhadap Kelemahan Pengendalian Intern (Y). Variabel belanja modal mempunyai $t_{hitung} (0,521) <$ dari $t_{tabel} (2,039)$ atau dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,607 > \alpha = 0,05$. Oleh karena itu H_4 ditolak, artinya belanja modal tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan dan penurunan belanja modal tidak akan mempengaruhi terjadinya kasus kelemahan pengendalian intern. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kristanto (2009) yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah. Menurut Kristanto (2009), belanja modal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah kabupaten/kota dikarenakan tidak terdeteksi adanya tindak korupsi atau kolusi oleh pejabat daerah, DPRD, dan pengusaha yang menimbulkan lemahnya pengendalian intern.
 - 5) Hasil pengujian hipotesis kelima menunjukkan bahwa Jumlah Penduduk (X5) berpengaruh terhadap Kelemahan Pengendalian Intern (Y). Variabel jumlah penduduk mempunyai $t_{hitung} (2,204) >$ dari $t_{tabel} (2,039)$ atau dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,037 < \alpha = 0,05$. Oleh karena itu H_5 diterima, artinya jumlah penduduk berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal. Dengan demikian, hasil penelitian ini berhasil menerima

hipotesis pertama yang menyatakan bahwa Jumlah Penduduk (X5) berpengaruh terhadap Kelemahan Pengendalian Intern (Y).

Saran

Atas dasar kesimpulan di atas, dapat diajukan saran-saran sebagai berikut. Penelitian ini hanya mengambil variable independen Pertumbuhan Ekonomi (X1) variabel Pendapatan Asli Daerah (X2), Ukuran Pemerintahan (X3), Belanja Modal (X4) dan Jumlah Penduduk (X5) sehingga hanya membatasi pengaruh terhadap Kelemahan Pengendalian Intern (Y). Oleh karena itu, perlu dikembangkan untuk penelitian selanjutnya dengan memasukkan variabel lainnya yang mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Intern sehingga mendapatkan hasilnya akan lebih baik. Meskipun dalam konteks yang kecil, namun hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dan manfaat bagi suatu perusahaan, bagi masyarakat dan para ilmuwan untuk lebih memahami tentang variabel - variabel yang di teliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. 2008. PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP Upaya Membentuk Internal Control Culture.
<http://syukriy.wordpress.com/2009/02/21/pp-602008-tentangspip-upaya-membentuk-internal-control-culture>.
- Doyle, Ge, Weili dan McVay. (2007). *Determinants of*

weaknesses in internal control over financial reporting. Working paper, Utah State University, University of Washington, dan New York University.

- Kristanto, S. B. "Pengaruh Ukuran Pemerintahan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal sebagai Prediktor Kelemahan Pengendalian Internal". 2009. *Jurnal Akuntansi UKRIDA*. Vol. 9.No. 1. ISSN: 1411-691X.

- Larassati, R, R. Anggraini dan E. Gerendrawaty. 2013. "Pengaruh Ukuran, Pertumbuhan dan Kompleksitas Pemerintah Daerah terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah". *Simposium Nasional Akuntansi XXVI*. 25-28 September 2013. Manado.

- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UIIPress.

- Martani, D dan F. Zaelani. 2011. "Pengaruh Ukuran, Pertumbuhan dan Kompleksitas Pemerintah Daerah terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah". *Simposium Nasional Akuntansi XXIV*. 21-22 Juli 2011. Banda Aceh.

- Petrovits, Christine , Shakespeare, Chaterine dan Shih, Aimee. 2010. *The Causes and Consequences of Internal*

Control Problems in
Nonprofit Organizations.
Accounting Review.

Puspitasari, Titus. 2013. *Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Kompleksitas Daerah (SKPD) terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah*. Skripsi Sarjana. UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.